

## Perkembangan Pemikiran Islam: Membaca Politik Islam Masa Nabi dalam Konteks Partai Islam

**M. Ikhwan**

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh-Aceh Barat  
[m.ikhwan@staindirundeng.ac.id](mailto:m.ikhwan@staindirundeng.ac.id)

Diterima: 28 Juli 2021    Disetujui: 5 Agustus 2021    Dipublikasikan: 7 Agustus 2021

**Abstract:** *This article discusses Islamic politics at the time of the Prophet Muhammad and its relation to the upheaval of the Indonesian Islamic party. The development of Islam that has continued to develop since the death of the Prophet presents its own challenges regarding the future of Islam which tries to restore Islam to the time of the Prophet. The idea of Daulah Islamiyah was raised as the great desire of the Muslim community, but several views related to the paradigm of religious and state relations were then raised to read the challenges of an Islamic state. This paper concludes that first, the concept of Islamic politics has been born since the time of Muhammad's Prophet's Prophethood, as evidenced by the attempt to merge ethnicity in Arab society with the process of Islamization (combining faith and political power). The concept of an Islamic state was echoed during the Khulafaur Rasyidin era in the caliphate system. Second, The relationship between state and religion is divided into three typologies, namely secularistic, formalistic, and substantialistic. The Indonesian Islamic political context includes a substantialistic context, which does not want the development of an Islamic state but is based on Islam in the practice of state ethics.*

**Keywords:** *Islamic Thought, Islamic Politics, Islamic Party*

**Abstrak:** Artikel ini membahas politik Islam pada masa Nabi Muhammad dan kaitannya dengan pergolakan partai Islam Indonesia. Pembangunan Islam yang terus berkembang sejak wafatnya Nabi memberikan tantangan tersendiri terkait masa depan Islam yang mencoba mengembalikan Islam seperti masa Nabi. Gagasan Daulah Islamiyah dimunculkan sebagai keinginan besar masyarakat Muslim, namun beberapa pandangan terkait dengan paradigma relasi agama dan negara kemudian dimunculkan untuk membaca tantangan negara Islam. Tulisan ini diberi kesimpulan bahwa pertama, Konsep Politik Islam sudah lahir sejak masa Kenabian Muhammad Rasulullah dibuktikan dengan upaya peleburan kesukuan dalam masyarakat Arab dengan poses Islamisasi (menggabungkan keimanan dan kekuasaan politik). Konsep negara Islam sempat digaungkan dalam masa Khulafaur Rasyidin dalam sistem kekhalifan. Kedua, hubungan negara dan agama dibagi menjadi tiga tipologi yakni sekularistik, formalistik, dan substansialistik. Konteks politik Islam keindonesiaan termasuk konteks yang substansialistik, tidak menginginkan pembangunan negara Islam namun melandaskan Islam dalam praktik etika bernegara.

**Kata Kunci:** *Pemikiran Islam, Politik Islam, Partai Islam*

## Pendahuluan

Pemikiran mengenai politik (*politics*) di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M. Filusuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*Polity*) yang terbaik. Di dalam *polity* semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normativ ini berlangsung sampai abad ke-19. Dewasa ini definisi mengenai politik yang normativ itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Politik juga disebut dengan kemahiran, kemahiran tentang orang-orang yang mungkin. Orang-orang Yunani purba sudah mengetahui hal itu dan menamakannya *politeke techne* yakni kemahiran dalam bidang kenegaraan.<sup>2</sup> Secara etimologis kata *politik* berasal dari bahasa Yunani *polis* yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti “polities” (warganegara) dan “politikos” nama sifat yang berarti kewarganegaraan (*civic*).<sup>3</sup>

Pendapat lain menyebutkan bahwa Politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.<sup>4</sup> Hakikat politik adalah kekuasaan (*power*) dan dengan begitu politik adalah serangkaian peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan.

Menyoal membangun kuasa negara dalam kekuatan basis agama, Anthony Black dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam* dari masa Nabi hingga masa kini, menyebut bahwa Islam merupakan agama yang sudah terlebih dahulu meng-kawinkan konsep politik dalam membangun masa depannya. Semua capaian itu dibangun atas dasar sebuah agama dan gagasan-gagasan baru yang dengan khas menggabungkan iman dengan kekuasaan politik.<sup>5</sup> Sebelum memasuki upaya membangun bangsa, masyarakat (*ummah*) Islam atau bisa disebut dengan ekspansi politik, Rasulullah yang terpilih sebagai penyampai pesan yang mengklaim bahwa keberadaannya adalah sebagai penyampai wahyu Tuhan kepada semua umat manusia.

Meskipun Muhammad dipengaruhi oleh adat Arab yang kesukuan, tradisi Yahudi, dan Kristen, ia menentang semuanya dan melebur semua pola tradisi tersebut dalam bahasa wahyu yang diterimanya sendiri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa gagasan Islam merupakan dobrakan yang menentukan dalam sejarah pemikiran manusia tentang politik dan masyarakat.<sup>6</sup> Usaha peleburan kesukuan secara universal sebagai upaya pembentukan kekuatan Islam dilakukan Rasulullah melalui dakwah persaudaraan spiritual *plus* hukum yang merangkul semua golongan, serta menyatakan bahwa kendali

<sup>1</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2010).

<sup>2</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (T.k.: Binacipta, 1985).

<sup>3</sup> R.N. Gilchrist, “Principle of Political Sciences” dalam F. Isjwara.

<sup>4</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010).

<sup>5</sup> Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

politik universal harus diraih oleh umat Islam, bahkan bila perlu melalui kekuatan militer.<sup>7</sup>

Usaha Rasulullah memperkenalkan agama dan hukum baru melabelkan sebuah identitas sosial yang mengikat seluruh anggotanya, menumbuhkan universalitas yang membentengi mereka dari kekuatan luar. Keberhasilan hukum Islam mewujudkan semua itu sebagian karena ajaran Islam meliputi seluruh aspek perilaku, bahkan seringkali dengan gambaran yang sangat mendetail. Syariat menggantikan adat-adat kesukuan seraya tetap mempertahankan semangat kelompok dalam praktik kehidupan antar-personal.<sup>8</sup>

Rasulullah mengubah kesukuan masyarakat Arab yang chauvinisme menjadi nasionalisme, mengubah tradisi yang politeisme menjadi monotheisme. Transisi ini tidak lepas dari praktik teokrasi yang diterapkan Rasulullah, serta menjadikan syariat sebagai kerangka struktur masyarakat Islam yang sampai tingkatan tertentu, didasarkan pada tatanan hukum yang bersifat nomokratik.

Babak baru masa depan Islam pasca wafatnya Rasulullah ditentukan melalui tangan Abu Bakr, seorang pendukung dan teman setia Muhammad paling awal, yang percaya kepadanya dan memimpin shalat jamaah selama sakit terakhir yang diderita Nabi, ditunjuk sebagai penerus Muhammad (8 juni 632) melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat Islam yang berkumpul di Madinah.<sup>9</sup> Kepadanyalah disandarkan tanggung jawab sebagai pemimpin umat Islam saat itu, posisi khalifah kemudian berlangsung turun-temurun yang kemudian dilanjutkan oleh Umar (634-644), Ustman (644) yang merupakan representasi dari kaum aristokrat Umayyah, dan tonggak kekhalfaan selanjutnya dipegang oleh Ali bin abi Thalib.

Keempat Khalifah ini diberi julukan Khulafaur Rasyidin atau lebih dikenal dengan empat khalifah pertama yang dipercaya umat Islam untuk memimpin pasca wafatnya Nabi. Proses lengsernya Ali sebagai khalifah melalui proses politik yang sangat kompleks. Kelembagaan khalifah sebagai manifestasi pemimpin umat Islam berlanjut hingga 1924, kekhalfaan kemudian melahirkan dinasti. Kekhalifan Umayyah (661-750), Abbasiyah (750-1258), Fatimiyah (909-1171), Utsmani (1517-1924). Pada maret 1924 kekhalfaan resmi dibubarkan.

Peran khalifah dalam Islam tidak hanya sebagai posisi pemimpin dalam institusi keagamaan saja, pandangan demikian merupakan pembeda bentuk kekhalfaan dengan bentuk imam dalam agama lain. Dalam pandangan Philip K. Hitti pewarisan misi Muhammad (*khilafah*) berarti pewarisan kedaulatan negara.<sup>10</sup>

Ide pembentukkan negara Islam muncul sekitar abad 20, sejatinya sebelum itu, semangat pembentukkan negara Islam atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan *daulah* sudah muncul sejak pemerintahan dinasti Abbasiyah yang kemudian pada abad ke-20, istilah itu ditransformasikan menjadi *al-daulah al-islamiyah* (negara Islam) dan

---

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti.

<sup>7</sup> Ramlan Surbakti.

<sup>8</sup> Ramlan Surbakti.

<sup>9</sup> Philip K. Hitti, *History of The Arab* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014).

<sup>10</sup> Philip K. Hitti.

dianggap sebagai hal yang sangat diinginkan oleh kaum Muslimin. Seperti teori sebelumnya mengenai kekhalifaan, justifikasi bagi negara Islam berpusat pada penjunjung-tinggian syariat (hukum Islam).<sup>11</sup>

## **Menakar Korelasi Agama dan Negara**

Berbicara mengenai relasi antara agama dan negara, hubungan keduanya menjadikan tipologi definisi relasinya menjadi 3, yakni sekularistik, formalistik, substansialistik.

### **1. Tipologi Sekularistik**

Salah satu tokoh intelektual Indonesia yang menggaungkan konsep sekularisme adalah Nurcholish Madjid, Gagasan yang bermula pada pidatonya di Menteng Raya pada 2 Januari 1970 ini cukup menyedot perhatian tokoh-tokoh Islam saat itu. Banyak tokoh yang menganggap bahwa gagasan Nurcholish adalah upaya pemisahan antara agama dan negara. Sebenarnya tidak, sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai sekularisme.<sup>12</sup> Kenyataan bahwa masyarakat Islam telah mengalami kesalahpahaman antara hal-hal islami yang bersifat transendental dan mana yang temporal. Gagasan sekularisasi Nurcholish sebenarnya ingin kembali meluruskan kenyataan ini. Gagasannya itu mengigninkan agar umat Islam menduniakan sesuatu yang duniawi dan mensakralkan sesuatu yang memang bersifat ukhrawi.

Sekularisasi sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sekularisme. Nurcholish memaknai sekularisasi sebagai sebuah proses. Proses yang dimaksud adalah proses penduniawian dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada keduniawian daripada sebelumnya. Jika sekularisasi merupakan sebuah proses yang dinamis, maka jelas beda dengan sekularisme yang sudah menjadi aliran pemikiran. Sekularisme bersifat tertutup dan kaku, serta ia sudah memiliki filsafat tersendiri. Jadi dengan tegas Nurcholish menganjurkan adanya sekularisasi, akan tetapi dengan tegas pula ia menolak sekularisme.

Gagasan sekularisasi ini lahir tentu tidak lepas dari kondisi sosial umat Islam pada saat itu. Nurcholish menangkap adanya ketidakmampuan partai Islam untuk menangkap sinyal darurat yang sedang dialaminya. Secara kuantitas, umat muslim Indonesia adalah komunitas muslim terbesar di dunia. Populasi kau muslimin di Indonesia mencapai kisaran 90 juta jiwa<sup>13</sup>. Akan tetapi partai Islam tidak mampu membawa para pengikutnya kedalam partai yang sudah dinamakan secara ideo-religius. Partai Islam terus menerus mengalami kekalahan bahkan akhirnya terpinggirkan. Keadaan yang lebih mencemaskan adalah adanya campur aduk antara hal-hal yang berbau dunia terhadap hal yang berbau ukhrawi. Bagi Nurcholish, partai politik adalah bagian dari urusan duniawi dan tidak perlu dibawa ke ranah ukhrawi. Karena kenyataan yang berkembang di masyarakat kala itu adalah menempatkan partai politik (Islam) sejajar dengan agama (Islam). Sampai berkembang pemahaman di masyarakat bahwa orang islam yang tidak memilih partai

---

<sup>11</sup> Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998).

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, *Islam Kemodrenan Dan Keindonesiaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008).

<sup>13</sup> Nurcholish Madjid.

islam diklaim kafir. Kenyataan inilah yang ingin segera diselesaikan oleh Nurcholish dengan gagasan sekularisasinya.

## 2. Tipologi Formalistik

Pandangan ini lebih mendasar terhadap penyandaran Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan sangat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Tipologi ini merupakan tipologi yang berusaha mengembalikan kembali atmosfer kehidupan Nabi dengan meneladani seluruhnya tanpa harus berpatokan terhadap aspek-aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial dari barat.

Asumsi tipologi ini besar di kalangan umat Islam memang ada yang memposisikan pemahaman, yang didasarkan pada asumsi bahwa Islam lebih dari sekedar doktrin agama yang membimbing kehidupan ruhani manusia, melainkan juga berusaha membangun suatu sistem dengan suatu cara hidup yang didasarkan pada agama. Secara konseptual agama tidak dapat terpisahkan dari politik, dan semua upaya pemikiran seorang Muslim tentang moral dan politik mempunyai dasar-dasar keagamaan.<sup>14</sup>

Aspek politik yang hendak menjadikan Islam sebagai pondasi pemerintahan dalam segala dimensinya inilah yang ditampilkan oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan mempunyai pengaruh yang cukup luas bagi umat Islam diberbagai belahan negara. Deklarasi tentang perlunya kembali kepada ajaran fundamental Islam dengan target *khilāfah islāmiyyah* atau mendirikan negara Islam dengan patron Nabi SAW dan sahabat empat mulai dirintis oleh Hassan al-Banna, Sayid Quthb, Said Hawwa, dan lainnya.

Hassan al-Banna yang merupakan pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin, menjelaskan salah satu misi gerakannya adalah untuk mendirikan negara Islam, yang ditegakkan di atas ajaran Islam, menerapkan aturan-aturan sosial, mengadvokasi prinsip-prinsip yang benar dan menyebarkan dakwahnya kepada seluruh umat manusia. Al-Banna memperingatkan kaum Muslim secara keseluruhan bahwa sepanjang negara seperti itu belum ada, setiap Muslim berdosa dan mereka bertanggungjawab di hadapan Allah karena kegagalan dan kelalaian mereka untuk mendirikannya. Al-Banna juga menganggap partai-partai politik sebagai ancaman potensial terhadap persatuan Islam yang baginya umat diperlukan untuk membangun kembali *khilāfah*.<sup>15</sup>

## 3. Tipologi Substansialistik

Dalam paradigma substansialistik, agama Islam mempunyai seperangkat prinsip dan nilai-nilai tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk sistem pemerintahan. Dalam perspektif Muhammad ‘Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tetapi betul-betul bersifat keduniawian. ‘Abduh menyatakan bahwa kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat atau kehendak publik. Kedaulatan rakyat ini, menurut ‘Abduh harus dibangun atas dasar prinsip-prinsip kebebasan (*hurriyah*),

<sup>14</sup> Lambton, “Islamic Political Thought” dalam Abd. Salam Arief, ‘Relasi Agama Dan Negara’, *Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2.Juli-Desember (2003), 278–87.

<sup>15</sup> Mun’im A. Sirry (ed.), “Islam Liberalisme Demokrasi” dalam Zayid Khan, ‘Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam’, *Jurnal Walisongo*, 22.Nomor 1 Mei (2014).

demokrasi (*shūrā*), dan konstitusi (*qanūn*) yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dan kekuasaan tersebut.<sup>16</sup>

Tipologi ini adalah tipologi yang menolak formalistik dan sekularistik, aliran ini berpendirian bahwa Islam tidak terdapat pada sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Menurut kelompok ini tak satu nash pun dalam al-Qur'an yang memrintahkan didirikannya sebuah negara Islam.

Dengan kata lain negara sebagai instrumen atau alat untuk memperbaiki kualitas umat melalui nilai-nilai luhur keagamaan dalam bernegara sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan, bukan menjadikan agama dan atau kepercayaan tertentu sebagai konsep negara atau bentuk lain yang dianggap ideal, karena Indonesia telah menemukan rumusan bernegara yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.<sup>17</sup>

### **Islam dan Politik dalam Konteks ke-Indonesiaan**

Persinggungan Islam dan politik dalam konteks Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda, Jepang dan sekutunya hingga era reformasi 1998.<sup>18</sup> Pada masa penjajahan dapat dilihat dari peran ulama dan kiai yang ikutserta menjadi penasihat kesultanan dalam menentukan arah kebijakan politik yang melemah akibat intervensi politik penjajah saat itu. Pada situasi genting di tengah berkecamuknya perang pusat kekuasaan berpindah dari istana ke pesantren-pesantren sebagai basis perlawanan mengusir penjajah. Pada era kemerdekaan politik Islam masih dirasakan denyut nadinya dalam mempertahankan kemerdekaan dari pihak-pihak yang kembali ingin menguasai Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan bertumbuhnya organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam seperti Hisbullah, Sabilillah, Barisan Kiai, Barisan Sabil, Perkumpulan Anak Deli Islam, Mujahidin Aceh, Pasukan Islam daerah Pekalongan, AOI (Angkatn Oemat Islam) Kebumen, Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama menjadi benteng pertahanan dan tidak sedikit mereka menjadi syuhada demi memperthankan kemerdekaan yang telah diraih.

Pasca kemerdekaan atau biasa dikenal dengan sebutan Orde Lama terjadi situasi politik yang sulit yang disulut oleh kontra antara PKI dan Islam dan memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI), pada saat itu politik Islam tanpak dalam upaya menumpas PKI dan antek-anteknya secara bersama-sama karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Setelah kekuasaan Orde Lama beralih pada kekuasaan Orde Baru, politik Islam dianggap terpuruk disebabkan oleh cita-cita umat Islam bergeser dari yang diinginkan pada saat itu, aspirasi umat Islam di bidang sosial keagamaan memang dipenuhi namun dalam percaturan politik mulai dibatasi, bahkan dalam setiap pentas pemilu digelar cenderung didominasi oleh partai politik tertentu yang notabene tidak diusung umat Islam. Keadaan berikutnya yang dapat dijelaskan tentang Islam dan politik di Indonesia adalah masa reformasi. Semangat

---

<sup>16</sup> Zapul Khan.

<sup>17</sup> Yusafida Rasyidin, 'Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16.Nomor 1 (2020), 35–44.

<sup>18</sup> RA. Erika Septiana, 'Tinjauan Al-Qur'an Dalam Dalam Nalar Politik Dunia Islam', *Istinbath*, 15/Th.XIV.Juni 2015 (2015), 105–22.

reformasi yang membuka ruang bagi demokrasi dan pembentukan beberapa partai baru mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi presiden yang berangkat dari partai yang berafiliasi pada Islam, meskipun harus mengakhiri jabatannya lebih awal namun keikutsertaan politik Islam dapat dirasakan di Indonesia.<sup>19</sup>

Bahkan pada era reformasi ini kemunculan partai yang berafiliasi pada Islam kembali tumbuh seperti PPP, PBB, PK, PKU, PNU, PP, dan PSII yang disinyalir dilatarbelakangi beberapa faktor seperti Pertama, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama, politik dan negara merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Kedua, faktor sosiologis karena umat Islam Indonesia sebagai mayoritas sehingga diperlukan wadah seperti partai Islam. Ketiga, faktor historis, partai Islam yang pernah ada dan ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia di masa yang lalu merupakan fakta sejarah yang perlu diwujudkan kembali. Keempat, faktor reformasi yang membuka ruang kebebasan dan demokratisasi bagi setiap golongan dan kelompok membentuk/mendirikan partai politik.<sup>20</sup>

Namun partai-partai yang dianggap berafiliasi pada Islam tersebut tidak mendapatkan suara terbanyak dan mendominasi. Kekalahan partai-partai Islam dinilai mempunyai dua faktor yaitu : meskipun jumlah partai politik Islam banyak akan tetapi elite-elite politik Islam yang mendirikan partai politik berorientasi pluralis dan nasionalis-religius diantaranya PAN dan PKB, kedua partai tersebut mempunyai basis yang kuat dan besar, yaitu Muhammadiyah dan NU. Kemudian faktor berikutnya adalah di kalangan umat Islam telah terjadi perubahan ideologis di mana mereka lebih melihat substansi Islam daripada formalisme Islam dalam bentuk partai Islam.<sup>21</sup>

Uraian di atas menjadi bukti bahwa politik Islam memburu dalam perjalanan Indonesia, akan tetapi perkembangan mutakhir hubungan Islam dan politik menemukan corak baru yang dianggap selaras dengan semangat keindonesiaan. Pemikir Nurcholis Madjid menulis keraguannya perihal partai Islam sebagai bentuk dari gerakan politik berbasis agama di Indonesia, dalam pandangan penulis, jargon “*Islam Yes; Partai Islam No?*” adalah hasil terjemahan Nurcholish atas kondisi sosial yang berkembang saat itu. Kenyataan sosial bahwa kaum muslimin di Indonesia mempunyai komunitas yang cukup besar turut berduka ketika partai politik yang berasaskan Islam tidak mendapatkan dukungan yang signifikan dari orang Islam sendiri. Nurcholish mengajukan beberapa pertanyaan kritis dan fundamental dalam hal ini. Seperti ia menuliskan:

*“Sampai dimanakah perkembangan akibat daya tarik yang jujur dari ide-ide Islam yang dikemukakan oleh para pemimpinnya itu, lisan maupun tulisan? Ataukah perkembangan kuantitatif Islam itu dapat dinilai sebagai tidak lebih daripada gejala adaptasi sosial karena perkembangan politik tanah air akhir-akhir ini, yaitu kalahnya kaum Komunis yang memberikan kesan kemenangan di pihak Islam? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin sekali dapat ditemukan dengan meletakkan pertanyaan berikutnya. Sampai dimanakah mereka tertarik pada partai-*

<sup>19</sup> RA. Erika Septiana.

<sup>20</sup> Lili Romli, ‘Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 1.Nomor 1 (2004), 29–48.

<sup>21</sup> Lili Romli.

*partai/organisasi-organisasi Islam? Kecuali sedikit saja, sudah terang mereka sama sekali tidak tertarik kepada partai-partai/organisasi-organisasi Islam”<sup>22</sup>*

Kemudian Nurcholish memberikan konklusi sederhana terhadap pilihan masyarakat waktu itu dengan jargon “*Islam, Yes; Partai Islam, No*”. Sesungguhnya pesan terdalam yang terkandung dalam jargon tersebut adalah kritik kreatif kepada Partai Islam kala itu bahwa Partai Islam “tidak laku” di masyarakat. Jadi perjuangan politik yang terus menerus dilakukan melalui partai Islam secara formal hendaknya dimodifikasi sesuai dengan tuntutan zaman. Terlebih kondisi Orde Baru kala itu masih terus curiga kepada golongan Islam dan traumatik dengan peristiwa-peristiwa pemberontakan yang dilakukan atas nama Islam seperti pemberontakan TI/DII. Maka Nurcholish memandang perlu kiranya nama Islam tidak dibawa-bawa dalam perjuangan kontestasi politik Islam di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Konsep Politik Islam sebenarnya sudah lahir sejak masa Kenabian Rasulullah dibuktikan dengan upaya meleburkan kesukuan dalam masyarakat Arab dilakukan dengan poses Islamisasi, dengan menggabungkan keimanan dan kekuasaan politik. Meskipun konsepnya teokratis dengan praktik nomokratik, konsep negara dalam Islam sempat digaungkan dalam masa Khulafaur Rasyidin dalam sistem kekhalifaan. Unsur negara Islam yang sempat digagas di abad 20 pasca runtuhnya Turki Utsmani adalah upaya membangun negara kekuasaan Islam dengan menjunjung tinggi syariat.

Dalam menelaah hubungan negara dan agama dibagi menjadi tiga tipologi yakni sekularistik, Formalistik, dan Substansialistik. Konteks politik Islam Keindonesiaan adalah termasuk konteks yang substansialistik, tidak menginginkan pembangunan negara Islam namun melandaskan Islam dalam praktik etika bernegara. Kenyataannya partai berbasis Islam yang marak di Indonesia gagal dibangun dalam cita-cita tipologi Fomalistik.

### **Daftar Pustaka**

Abd. Salam Arief, ‘Relasi Agama Dan Negara’, *Hermenia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2.Juli-Desember (2003), 278–87

Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006)

Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim* (Bandung: Mizan, 1998)

F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (T.k.: Binacipta, 1985)

Lili Romli, ‘Partai Islam Dan Pemilih Islam Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 1.Nomor 1 (2004), 29–48

---

<sup>22</sup> Nurcholish Madjid.



Miriam Budiarjo, *Dasaaar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 2010)

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodrenan Dan Keindonesiaan* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008)

Philip K. Hitti, *History of The Arab* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014)

RA. Erika Septiana, 'Tinjauan Al-Qur'an Dalam Dalam Nalar Politik Dunia Islam', *Istinbath*, 15/Th.XIV.Juni 2015 (2015), 105–22

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010)

Yusafri Rasyidin, 'Menjelajahi Pemikiran Politik Nurcholis Madjid Tentang Agama Dan Negara', *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16.Nomor 1 (2020), 35–44

Zapul Khan, 'Relasi Agama Dan Negara Dalam Islam', *Jurnal Walisongo*, 22.Nomor 1 Mei (2014)